

Korelasi Modal Sosial Budaya Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung

Elvi Yasniza Nova¹, Mohamad Firdaus²

¹²Universitas Terbuka

*e-mail: yasnizanovaelvi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara modal sosial budaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Kajian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kehadiran warga dalam kegiatan gotong royong, sementara nilai kekerabatan, musyawarah, dan solidaritas masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat nagari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, meliputi wali nagari, perangkat nagari, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga yang terlibat maupun kurang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial budaya masyarakat masih cukup kuat, terutama pada kegiatan adat, keagamaan, musyawarah, dan hubungan kekerabatan. Namun, partisipasi dalam gotong royong pembangunan fasilitas umum menurun dan kehadiran warga pada beberapa kegiatan hanya berkisar dua puluh persen dari penduduk sekitar lokasi. Faktor ekonomi, kesibukan kerja, mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup, dan melemahnya rasa tanggung jawab kolektif menjadi penyebab utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial budaya berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat, tetapi penguatannya memerlukan strategi nagari yang adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi.

Kata kunci : Gotong Royong; Modal Sosial Budaya; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Nagari; Solidaritas Sosial

ABSTRACT

This study examines the relationship between cultural social capital and community participation in the development of Nagari Padang Laweh, Koto VII District, Sijunjung Regency. The study is motivated by declining citizen attendance in mutual cooperation activities, although kinship, deliberation, and solidarity remain important values in nagari social life. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively and consisted of the nagari head, nagari officials, customary leaders, community figures, youth representatives, and residents who were either actively or less actively involved in mutual cooperation activities. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the community still possesses relatively strong cultural social capital, especially in customary events, religious activities, deliberation forums, and kinship relations. However, participation in mutual cooperation for public facility development has declined, with attendance in several activities reaching only around twenty percent of residents living near the activity site. Economic pressure, work demands, population mobility, lifestyle change, and weakening collective responsibility were identified as the main factors. The study concludes that cultural social capital is closely related to community participation, but its reinforcement requires nagari-level strategies that are adaptive to socio-economic change.

Keywords : Community Participation; Cultural Social Capital; Mutual Cooperation; Nagari Development; Social Solidarity

PENDAHULUAN

Pembangunan nagari tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan pemerintah nagari atau pelaksanaan program fisik. Pembangunan pada tingkat lokal merupakan proses sosial yang melibatkan warga sebagai pemilik kebutuhan, pelaksana kegiatan, penerima manfaat, sekaligus pengawas hasil pembangunan. Dalam kerangka pembangunan desa, keterlibatan masyarakat menjadi syarat penting karena pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan warga berisiko menghasilkan program yang kurang dimiliki oleh masyarakat.

Pedoman pembangunan desa juga menempatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai proses yang melibatkan masyarakat melalui semangat gotong royong (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Nagari Padang Laweh berada dalam wilayah Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Wilayah kecamatan ini memiliki karakter sosial ekonomi yang dapat dibaca melalui publikasi statistik resmi, sedangkan dinamika sosial masyarakat nagari tetap dipengaruhi oleh struktur adat, relasi kekerabatan, serta pola hidup pedesaan Minangkabau (BPS Kabupaten Sijunjung, 2025). Dalam masyarakat Minangkabau, nagari bukan semata wilayah administratif, tetapi juga ruang sosial budaya yang dibangun melalui hubungan kaum, jorong, tokoh adat, perangkat pemerintahan, dan kelompok warga. Karena itu, pembangunan nagari akan lebih kuat apabila ditopang oleh modal sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Modal sosial merupakan konsep yang menjelaskan sumber daya sosial yang lahir dari jaringan, norma, dan kepercayaan. Putnam (2000) menekankan bahwa kehidupan warga yang aktif dalam jaringan sosial dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama. Woolcock dan Narayan (2000) memandang modal sosial sebagai relasi sosial yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, sedangkan Uphoff (2000) membedakan modal sosial pada ranah struktural dan kognitif, yaitu kelembagaan, jaringan, nilai, norma, kepercayaan, dan solidaritas. Dalam konteks nagari, modal sosial budaya dapat terlihat melalui musyawarah, gotong royong, hubungan kekerabatan, kepatuhan terhadap norma adat, dan kesediaan warga membantu kepentingan bersama.

Gotong royong merupakan bentuk paling nyata dari modal sosial budaya tersebut. Kegiatan ini mencerminkan adanya kesediaan untuk bekerja bersama tanpa selalu dihitung sebagai transaksi ekonomi. Humaedi et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik gotong royong di desa dapat berubah ketika kebijakan, insentif, dan kebutuhan ekonomi mendorong masyarakat masuk ke pola partisipasi yang lebih prosedural. Artinya, gotong royong tidak selalu hilang, tetapi makna dan cara kerjanya dapat bergeser dari partisipasi sukarela menuju partisipasi yang bergantung pada ajakan formal, kedekatan lokasi, atau manfaat langsung yang dirasakan warga.

Fenomena serupa tampak di Nagari Padang Laweh. Berdasarkan pengamatan awal dan keterangan informan, masyarakat masih mempertahankan hubungan kekerabatan, musyawarah, dan kepedulian sosial dalam kegiatan adat maupun keagamaan. Akan tetapi, partisipasi dalam kegiatan gotong royong pembangunan fasilitas umum menunjukkan penurunan. Dalam beberapa kegiatan, warga yang hadir hanya sekitar dua puluh persen dari jumlah penduduk yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Kehadiran yang terbatas ini menunjukkan bahwa modal sosial budaya belum sepenuhnya berubah menjadi partisipasi kolektif dalam pembangunan nagari.

Penurunan partisipasi masyarakat bukan persoalan yang berdiri sendiri. Faktor ekonomi menjadi alasan yang paling sering muncul karena sebagian warga lebih memprioritaskan pekerjaan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kesibukan pekerjaan, mobilitas ke luar daerah, perkembangan teknologi komunikasi, serta perubahan gaya hidup juga mengurangi intensitas pertemuan langsung antarwarga. Temuan tentang desa lain memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh kesadaran, pendidikan, dukungan pemerintah, faktor ekonomi, serta ruang deliberasi yang tersedia (Ginting et al., 2024; Latifah et al., 2024).

Kajian mengenai modal sosial dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kepercayaan, jaringan, dan norma dapat meningkatkan keterlibatan warga. Delisa et al. (2024) menemukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Sarjiyanto et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa berbagai bentuk modal, termasuk modal sosial, dapat mendukung pemberdayaan masyarakat perdesaan. Sementara itu, Badaruddin et al. (2021) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan lokal berbasis modal sosial dapat membantu pemberdayaan masyarakat desa apabila hubungan warga, aparatur, dan lembaga ekonomi lokal berjalan saling mendukung.

Kajian internasional juga menempatkan modal sosial sebagai mekanisme penting dalam pembangunan lokal. Mathews (2021) menjelaskan bahwa pemimpin lokal dapat membangun konfigurasi bonding, bridging, dan linking social capital untuk mencapai tujuan pembangunan, meskipun konfigurasi tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Auliah et al. (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial berperan dalam tindakan kolektif masyarakat desa ketika menghadapi krisis. Nosratabadi et al. (2020) menambahkan bahwa modal sosial memperkuat pertukaran informasi, dukungan, dan ketahanan

komunitas. Dengan demikian, modal sosial perlu dilihat sebagai sumber daya yang dinamis, bukan sebagai nilai budaya yang otomatis bertahan tanpa pengelolaan.

Penelitian ini penting karena menghubungkan dua sisi yang sering muncul secara terpisah, yaitu masih kuatnya nilai sosial budaya dan menurunnya partisipasi nyata dalam gotong royong pembangunan. Modal sosial budaya yang tampak pada kegiatan adat dan keagamaan belum tentu selalu hadir pada kegiatan pembangunan fasilitas umum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab empat fokus utama, yaitu kondisi modal sosial budaya masyarakat, tingkat partisipasi dalam gotong royong, faktor penyebab rendahnya partisipasi, dan hubungan antara modal sosial budaya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Padang Laweh.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan modal sosial budaya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Padang Laweh. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah nagari dan tokoh masyarakat dalam menyusun strategi penguatan gotong royong yang lebih sesuai dengan kondisi warga saat ini. Secara akademik, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana modal sosial budaya bekerja dalam konteks nagari Minangkabau yang sedang menghadapi perubahan ekonomi dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur hubungan antarvariabel melalui angka statistik, melainkan memahami makna, pola, dan alasan sosial yang menjelaskan mengapa modal sosial budaya masih tampak kuat pada satu sisi, tetapi partisipasi gotong royong pembangunan menurun pada sisi lain. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti membaca fenomena sosial secara mendalam berdasarkan konteks, pengalaman informan, dan situasi alami di lapangan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian adalah Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena nagari ini memiliki tradisi gotong royong dan ikatan sosial budaya yang masih dikenali oleh masyarakat, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan penurunan kehadiran warga dalam kegiatan pembangunan. Desain penelitian bersifat studi kasus kualitatif karena penelitian berusaha memahami satu kasus sosial tertentu secara rinci melalui banyak sumber data, sebagaimana disarankan dalam penelitian berbasis kasus (Yin, 2018).

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu modal sosial budaya dan pembangunan nagari. Informan meliputi Wali Nagari Padang Laweh, perangkat nagari, Kasi Kesejahteraan, tokoh adat atau niniak mamak, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga yang hadir maupun tidak hadir dalam kegiatan gotong royong. Keragaman informan diperlukan agar data tidak hanya berasal dari sudut pandang pemerintah nagari, tetapi juga mencakup pandangan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Tabel 1. Sumber data dan informasi penelitian

No	Informan/Sumber Data	Informasi yang Digali
1	Wali Nagari dan perangkat nagari	Kebijakan pembangunan, pola ajakan gotong royong, perubahan partisipasi warga, dan dokumen kegiatan.
2	Kasi Kesejahteraan dan lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan kegiatan sosial, tingkat kehadiran warga, serta hambatan koordinasi lapangan.
3	Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	Nilai adat, musyawarah, solidaritas, kepatuhan norma, dan perubahan budaya gotong royong.
4	Pemuda dan warga	Alasan hadir atau tidak hadir, pengaruh pekerjaan, persepsi manfaat, serta harapan terhadap pembangunan nagari.
5	Dokumen dan observasi kegiatan	Foto kegiatan, catatan kehadiran, arsip pembangunan, serta kondisi pelaksanaan gotong royong.

Sumber: diolah dari rancangan dan data penelitian, 2026

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat bentuk kegiatan gotong royong, jumlah kehadiran warga, pola interaksi antarwarga, dan keterlibatan kelompok masyarakat pada saat kegiatan berlangsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan tentang perubahan partisipasi, alasan warga tidak hadir, serta persepsi

terhadap nilai gotong royong. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui foto kegiatan, catatan kehadiran, arsip nagari, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan sosial.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan modal sosial budaya, partisipasi gotong royong, faktor penghambat, dan hubungan keduanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel tematik agar pola temuan lebih mudah dibaca. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan analisis tematik juga digunakan untuk menemukan pola makna, sebab kualitas penelitian kualitatif sangat bergantung pada ketepatan peneliti dalam membaca tema, konteks, dan konsistensi data (Braun & Clarke, 2021; Moleong, 2018).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan perangkat nagari, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan warga. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumentasi. Dengan cara tersebut, temuan penelitian tidak hanya bergantung pada pernyataan satu informan, melainkan didukung oleh beberapa bukti yang saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial budaya masyarakat Nagari Padang Laweh masih berada pada kondisi cukup kuat. Hal ini tampak dari masih terpeliharanya hubungan kekerabatan, rasa saling mengenal, keterlibatan warga dalam kegiatan adat, partisipasi pada kegiatan keagamaan, serta kebiasaan bermusyawarah ketika membahas urusan nagari. Warga masih menjadikan tokoh adat, tokoh agama, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat sebagai rujukan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur jaringan sosial dan kepercayaan masih bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Kekuatan modal sosial budaya terutama terlihat pada kegiatan yang berhubungan dengan adat, kematian, pernikahan, wirid, dan kegiatan sosial yang langsung menyentuh hubungan personal antarwarga. Dalam kegiatan tersebut, warga cenderung hadir karena merasa memiliki hubungan emosional, hubungan keluarga, atau kewajiban sosial yang kuat. Keadaan ini sejalan dengan pandangan Putnam (2000) bahwa jaringan sosial dan norma timbal balik dapat mendorong warga untuk terlibat dalam tindakan bersama. Akan tetapi, kekuatan modal sosial tersebut tidak selalu otomatis berpindah ke kegiatan pembangunan fasilitas umum.

Tabel 2. Kondisi modal sosial budaya masyarakat Nagari Padang Laweh

Unsur Modal Sosial Budaya	Temuan Utama	Makna bagi Pembangunan Nagari
Kepercayaan	Warga masih mempercayai tokoh adat, tokoh agama, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat sebagai rujukan sosial.	Kepercayaan menjadi pintu awal untuk mengajak warga terlibat dalam kegiatan pembangunan.
Jaringan sosial	Hubungan kekerabatan, jorong, pemuda, dan kelompok keagamaan masih berjalan dalam kegiatan tertentu.	Jaringan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan membagi peran warga secara lebih efektif.
Norma dan nilai budaya	Musyawarah, tolong-menolong, rasa malu sosial, dan penghormatan kepada adat masih dikenal oleh masyarakat.	Norma dapat menjadi dasar penguatan tanggung jawab kolektif terhadap fasilitas umum.
Solidaritas	Solidaritas masih kuat pada kegiatan adat, kematian, pernikahan, dan keagamaan, tetapi melemah pada kegiatan pembangunan fisik.	Perlu pengalihan energi solidaritas dari kegiatan personal menuju agenda pembangunan bersama.

Sumber: diolah dari hasil observasi dan wawancara, 2026

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa partisipasi warga dalam gotong royong pembangunan mengalami penurunan. Pada masa lalu, kegiatan perbaikan jalan, pembersihan saluran air, pembangunan fasilitas umum, dan pembersihan lingkungan dapat menggerakkan warga dari beberapa jorong. Saat ini, kehadiran lebih banyak berasal dari warga yang tinggal di dekat lokasi kegiatan, aparatur nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuda tertentu, dan beberapa warga yang masih memiliki kepedulian tinggi. Dalam kegiatan yang diamati, kehadiran warga hanya sekitar dua puluh persen dari penduduk sekitar lokasi kegiatan.

Penurunan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari gotong royong yang bersifat luas menuju partisipasi yang lebih terbatas. Kegiatan bersama tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab seluruh warga nagari, melainkan cenderung dianggap sebagai urusan warga yang paling dekat dengan lokasi kegiatan. Situasi ini selaras dengan kajian Humaedi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa gotong royong desa dapat bergeser ketika tuntutan ekonomi dan kelembagaan mengubah orientasi partisipasi warga. Dengan kata lain, warga tidak selalu menolak pembangunan, tetapi kehadiran mereka dipengaruhi oleh pertimbangan waktu, manfaat, jarak, dan prioritas ekonomi.

Faktor yang paling dominan memengaruhi rendahnya partisipasi adalah tekanan ekonomi. Sebagian besar warga lebih mengutamakan pekerjaan harian karena pendapatan keluarga menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada waktu kerja sering dianggap mengurangi kesempatan memperoleh penghasilan. Informan warga menjelaskan bahwa mereka tidak selalu menolak kegiatan bersama, tetapi sulit hadir apabila jadwal kegiatan berbenturan dengan pekerjaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dibaca hanya dari aspek kesadaran, tetapi juga harus memperhatikan beban ekonomi dan struktur waktu warga.

Selain faktor ekonomi, perubahan gaya hidup ikut memengaruhi partisipasi. Perkembangan teknologi komunikasi, mobilitas kerja, dan meningkatnya kesibukan individu menyebabkan interaksi langsung antarwarga berkurang. Pada masa lalu, pertemuan fisik menjadi bagian dari kebiasaan sosial, sedangkan saat ini komunikasi lebih sering dilakukan melalui perangkat digital atau hanya terjadi ketika ada kepentingan tertentu. Perubahan ini membuat rasa tanggung jawab kolektif tidak lagi sekuat sebelumnya. Bahri et al. (2023) menegaskan bahwa pembangunan yang hanya mengejar kemajuan fisik dapat menyebabkan kemunduran nilai sosial budaya apabila modal sosial lokal tidak dikelola secara sadar.

Tabel 3. Faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi gotong royong

Faktor	Bentuk Temuan Lapangan	Dampak terhadap Partisipasi
Ekonomi	Warga memprioritaskan pekerjaan harian dan pendapatan keluarga.	Kehadiran gotong royong menurun ketika kegiatan bertepatan dengan waktu kerja.
Kesibukan dan mobilitas	Sebagian warga bekerja di luar wilayah atau memiliki jadwal kerja yang tidak tetap.	Partisipasi tidak merata dan lebih banyak diikuti warga yang dekat dengan lokasi.
Perubahan gaya hidup	Orientasi pada kepentingan pribadi meningkat dan interaksi langsung antarwarga berkurang.	Rasa tanggung jawab kolektif terhadap kegiatan sosial menjadi lebih lemah.
Komunikasi pembangunan	Informasi kegiatan belum selalu disertai penjelasan manfaat, pembagian tugas, dan tindak lanjut.	Sebagian warga merasa kegiatan hanya urusan pemerintah nagari atau warga sekitar lokasi.

Sumber: diolah dari hasil wawancara, 2026

Hubungan antara modal sosial budaya dan partisipasi masyarakat tampak dalam dua pola. Pertama, ketika kepercayaan, norma, dan jaringan sosial masih kuat, warga lebih mudah diajak hadir dalam kegiatan yang dipandang penting bagi kehidupan bersama. Kedua, ketika nilai sosial tersebut tidak diperkuat melalui komunikasi, keteladanan, jadwal yang sesuai, dan manfaat yang jelas, partisipasi warga menurun walaupun hubungan sosial sehari-hari masih terlihat harmonis. Dengan demikian, modal sosial budaya bukan sesuatu yang hilang, melainkan sedang mengalami pelemahan fungsi pada ranah pembangunan fisik.

Temuan ini memperkuat hasil Delisa et al. (2024) bahwa modal sosial berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kepercayaan menjadi unsur penting karena warga akan lebih mau hadir apabila mereka percaya bahwa kegiatan pembangunan benar-benar dibutuhkan dan dikelola secara terbuka. Ginting et al. (2024) juga menunjukkan bahwa partisipasi perencanaan desa dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman warga. Dalam konteks Nagari Padang Laweh, kesadaran warga masih ada, tetapi perlu dihidupkan kembali melalui komunikasi publik yang lebih dekat dengan kebutuhan dan jadwal masyarakat.

Keterkaitan antara modal sosial dan partisipasi juga dapat dilihat melalui bentuk bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding social capital tampak dalam hubungan kekerabatan dan kedekatan antarwarga satu lingkungan. Bridging social capital terlihat ketika warga antarjorong dapat bekerja sama dalam kegiatan nagari. Linking social capital muncul dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah nagari, tokoh adat, dan lembaga lokal. Mathews (2021) mengingatkan bahwa ketiga bentuk modal sosial tersebut perlu dipelihara karena sulit bertahan jika tidak ada aktor yang menjembatani kerja sama. Di Nagari Padang Laweh, peran

tokoh adat, perangkat nagari, dan pemuda menjadi penting untuk menghubungkan kembali warga dengan agenda pembangunan.

Modal sosial budaya yang masih hidup dapat menjadi dasar perbaikan partisipasi. Namun, strategi penguatan tidak cukup hanya berupa imbauan moral agar warga hadir. Pemerintah nagari perlu mengatur jadwal gotong royong yang lebih sesuai dengan pola kerja warga, memperkuat musyawarah sebelum kegiatan, menjelaskan manfaat kegiatan secara terbuka, membagi tugas berdasarkan jorong atau kelompok, serta memberikan penghargaan sosial bagi warga yang aktif. Strategi ini tidak harus selalu berupa imbalan uang, tetapi dapat berupa pengakuan, publikasi kegiatan, penguatan peran pemuda, dan pelibatan tokoh adat sebagai penggerak sosial.

Tabel 4. Keterkaitan modal sosial budaya dengan partisipasi masyarakat

Dimensi Hubungan	Penjelasan	Arah Penguatan
Bonding	Ikatan keluarga dan kedekatan warga satu lingkungan masih kuat, tetapi belum selalu mendorong gotong royong lintas kegiatan.	Mengaktifkan kelompok kecil berbasis jorong, kaum, dan pemuda.
Bridging	Kerja sama antarjorong menurun karena partisipasi cenderung terbatas di sekitar lokasi kegiatan.	Membangun agenda gotong royong bergilir dan lintas jorong.
Linking	Hubungan masyarakat dengan pemerintah nagari tetap ada, tetapi perlu diperkuat melalui komunikasi dan transparansi.	Memperjelas tujuan, manfaat, jadwal, dan hasil kegiatan kepada warga.
Norma kolektif	Nilai gotong royong masih dikenal, tetapi kalah oleh tekanan ekonomi dan kesibukan individu.	Menjadikan gotong royong sebagai kegiatan sosial yang terencana, dihargai, dan relevan dengan kebutuhan warga.

Sumber: sintesis hasil penelitian, 2026

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan nagari membutuhkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Apabila pembangunan hanya dipahami sebagai penyelesaian pekerjaan infrastruktur, maka gotong royong akan dipandang sebagai tenaga kerja tambahan. Sebaliknya, apabila pembangunan dipahami sebagai proses membangun rasa memiliki, warga akan melihat kehadiran mereka sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sarjiyanto et al. (2024) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan memerlukan kombinasi modal ekonomi, modal sosial, dan modal psikologis. Artinya, pembangunan nagari perlu menguatkan keyakinan warga bahwa kontribusi mereka penting bagi masa depan lingkungan sendiri.

Dalam perspektif ketahanan komunitas, modal sosial membantu warga berbagi informasi, saling menolong, dan merespons persoalan bersama. Auliah et al. (2022) memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada sesama warga dan pemerintah dapat memengaruhi tindakan kolektif masyarakat desa. Nosratabadi et al. (2020) juga menunjukkan bahwa modal sosial berperan dalam pertukaran informasi dan dukungan komunitas. Relevansinya bagi Nagari Padang Laweh adalah perlunya membangun komunikasi yang membuat warga merasa dilibatkan sejak awal, bukan hanya diminta hadir ketika kegiatan sudah ditentukan.

Jika dibandingkan dengan kajian pembangunan nagari di Sumatera Barat, temuan ini menunjukkan pola yang relatif serupa. Latifah et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari membutuhkan ruang komunikasi dan kesadaran warga. Dalam kasus Nagari Padang Laweh, ruang komunikasi tersebut perlu diperkuat agar masyarakat memahami tujuan kegiatan dan merasa bahwa hasil pembangunan adalah milik bersama. Peran pemerintah nagari tidak hanya mengundang warga, tetapi juga membangun alasan sosial mengapa warga perlu hadir.

Dengan demikian, hubungan modal sosial budaya dan partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai hubungan yang saling menguatkan. Modal sosial yang kuat mendorong partisipasi, sedangkan partisipasi yang terus dijalankan akan memperkuat kembali modal sosial. Sebaliknya, ketika partisipasi menurun dalam jangka panjang, nilai gotong royong, rasa memiliki, dan solidaritas akan ikut melemah. Oleh karena itu, strategi nagari perlu diarahkan pada penguatan siklus positif antara kepercayaan, jaringan, norma, dan keterlibatan warga dalam pembangunan.

Pola partisipasi warga dalam penelitian ini memperlihatkan perbedaan antara partisipasi berbasis kedekatan emosional dan partisipasi berbasis kepentingan publik. Pada kegiatan adat, kematian, pernikahan,

dan keagamaan, kehadiran warga relatif lebih mudah terbentuk karena hubungan personal dan kewajiban sosial terasa langsung. Sebaliknya, pada kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembersihan drainase, atau pemeliharaan fasilitas umum, sebagian warga cenderung menilai manfaat kegiatan dari kedekatan lokasi dan dampak langsung bagi rumah tangga mereka. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa modal sosial budaya masih hidup, tetapi belum selalu terhubung dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari perlu memindahkan cara komunikasi dari sekadar pemberitahuan kegiatan menuju penjelasan manfaat kolektif. Undangan gotong royong yang hanya menyebut waktu dan lokasi sering kali belum cukup untuk membangkitkan kesadaran warga. Warga perlu diberi pemahaman bahwa perbaikan jalan, saluran air, atau fasilitas umum bukan hanya kebutuhan warga sekitar lokasi, tetapi bagian dari kepentingan nagari secara keseluruhan. Ketika manfaat kolektif dijelaskan melalui musyawarah dan tokoh yang dipercaya, modal sosial yang sudah ada dapat lebih mudah berubah menjadi partisipasi nyata.

Peran tokoh adat dan tokoh masyarakat masih sangat penting dalam konteks ini. Niniak mamak, tokoh agama, perangkat nagari, dan pemuda memiliki posisi sosial yang dapat menjembatani hubungan antara pemerintah nagari dan warga. Peran tersebut tidak cukup hanya digunakan pada saat kegiatan berlangsung, tetapi perlu diaktifkan sejak tahap perencanaan. Keterlibatan tokoh lokal pada tahap awal dapat memperkuat legitimasi kegiatan karena warga melihat bahwa program pembangunan bukan hanya arahan administratif, melainkan hasil kesepakatan sosial yang melibatkan unsur nagari.

Pemuda juga perlu ditempatkan sebagai aktor penggerak, bukan hanya sebagai tenaga pelaksana. Perubahan gaya hidup dan penggunaan teknologi dapat menjadi tantangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Kelompok pemuda dapat membantu menyebarkan informasi kegiatan melalui grup komunikasi, mendokumentasikan kegiatan, dan membangun kebanggaan sosial melalui publikasi kegiatan nagari. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya menjadi penyebab berkurangnya interaksi langsung, tetapi dapat dipakai untuk menguatkan kembali komunikasi sosial dan mengajak warga berpartisipasi.

Dari sisi waktu pelaksanaan, kegiatan gotong royong perlu mempertimbangkan pola kerja masyarakat. Jika sebagian besar warga bekerja pada jam tertentu, maka kegiatan yang selalu dilaksanakan pada waktu kerja akan sulit diikuti. Pemerintah nagari dapat melakukan musyawarah kecil untuk menentukan jadwal yang paling memungkinkan, misalnya akhir pekan, sore hari, atau sistem giliran antarjorong. Penyesuaian jadwal tidak mengurangi nilai gotong royong, justru menunjukkan bahwa pemerintah nagari memahami kondisi ekonomi warga dan berusaha membuat partisipasi lebih realistis.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi dapat diperkuat melalui pembagian peran yang jelas. Warga tidak selalu harus hadir dalam bentuk tenaga fisik yang sama. Sebagian warga dapat berkontribusi melalui konsumsi, peralatan, pengawasan, informasi, atau dukungan logistik sesuai kemampuan masing-masing. Pemahaman partisipasi yang lebih luas ini penting agar warga yang memiliki keterbatasan waktu tetap merasa bisa mengambil bagian. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kerja fisik, tetapi sebagai kontribusi sosial yang dapat mengambil banyak bentuk.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya strategi revitalisasi gotong royong berbasis modal sosial budaya. Strategi tersebut dapat dimulai dari pemetaan aktor lokal, pemetaan kelompok warga yang aktif dan kurang aktif, penentuan jenis kegiatan prioritas, serta penyusunan pola komunikasi yang berbeda untuk setiap kelompok. Warga yang selama ini aktif dapat dijadikan penggerak awal, sedangkan warga yang jarang hadir perlu diajak melalui pendekatan yang lebih personal dan tidak menyalahkan. Pendekatan semacam ini lebih sesuai dengan karakter masyarakat nagari yang menjunjung hubungan kekeluargaan.

Pemerintah nagari juga perlu menjaga transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan. Kejelasan mengenai sumber dana, tujuan kegiatan, kebutuhan tenaga, dan hasil yang ingin dicapai dapat meningkatkan kepercayaan warga. Apabila warga merasa informasi pembangunan terbuka, mereka lebih mudah percaya bahwa partisipasi mereka benar-benar diperlukan. Transparansi juga mencegah munculnya anggapan bahwa pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah nagari karena sudah memiliki anggaran. Dalam konteks modal sosial, kepercayaan terhadap pemerintah lokal merupakan unsur penting dari *linking social capital*.

Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa modal sosial budaya tidak selalu bekerja secara seragam pada semua jenis kegiatan. Nilai kebersamaan dapat tetap kuat dalam kegiatan yang bersifat personal dan kultural, tetapi melemah pada kegiatan pembangunan yang dianggap administratif atau tidak memberi manfaat langsung. Oleh sebab itu, penelitian tentang modal sosial perlu memperhatikan ruang sosial tempat modal sosial itu bekerja. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya nilai gotong royong, tetapi juga oleh cara nilai tersebut dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang digunakan bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pada satu nagari. Hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh nagari di Kabupaten Sijunjung atau Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat kekuatan modal sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan instrumen kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur dimensi kepercayaan, jaringan, norma, solidaritas, dan partisipasi masyarakat secara lebih terukur. Meskipun demikian, temuan kualitatif ini memberikan gambaran mendalam tentang perubahan gotong royong dan kebutuhan strategi penguatan partisipasi di tingkat nagari.

Berdasarkan temuan tersebut, model penguatan partisipasi yang paling sesuai bukan model instruktif, melainkan model persuasif berbasis kedekatan sosial. Pemerintah nagari dapat memulai dari forum kecil di tingkat jorong untuk mendengar alasan warga, menyesuaikan agenda, dan membangun kesepakatan. Forum kecil lebih dekat dengan warga sehingga alasan ketidakhadiran dapat dipahami secara lebih konkret. Setelah itu, hasil kesepakatan jorong dapat dibawa ke musyawarah nagari agar menjadi keputusan bersama yang lebih kuat secara sosial.

Penguatan partisipasi juga perlu memperhatikan kelompok warga yang selama ini jarang hadir. Mereka tidak sebaiknya langsung diberi label tidak peduli, karena sebagian besar memiliki alasan ekonomi dan waktu. Pemerintah nagari dapat membuat pilihan bentuk kontribusi yang lebih lentur, misalnya gotong royong bergilir, dukungan bahan, konsumsi, peralatan, atau iuran sukarela yang disepakati secara terbuka. Fleksibilitas ini dapat menjaga nilai gotong royong tetap hidup tanpa memaksa semua warga hadir dalam bentuk yang sama.

Di sisi lain, keteladanan aparaturnagari dan tokoh lokal menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Warga lebih mudah tergerak apabila melihat perangkat nagari, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda hadir lebih dahulu dalam kegiatan bersama. Keteladanan ini memperkuat norma sosial karena warga merasa kegiatan tersebut benar-benar bernilai. Dalam masyarakat yang masih menghargai hubungan sosial dan figur lokal, kehadiran tokoh sering kali lebih efektif daripada imbauan administratif yang bersifat formal.

Program pembangunan nagari juga perlu diberi ruang evaluasi setelah kegiatan selesai. Evaluasi sederhana dapat dilakukan melalui pertemuan singkat atau laporan terbuka mengenai apa yang telah dikerjakan, siapa saja yang terlibat, dan manfaat apa yang diperoleh. Evaluasi semacam ini dapat meningkatkan rasa memiliki karena warga melihat hasil konkret dari partisipasi mereka. Jika kegiatan selesai tanpa umpan balik, warga yang sudah hadir dapat merasa kontribusinya tidak terlihat, sedangkan warga yang belum hadir tidak mendapatkan dorongan untuk terlibat pada kegiatan berikutnya.

Dengan demikian, penguatan modal sosial budaya di Nagari Padang Laweh perlu diarahkan pada tiga langkah. Pertama, memperkuat kembali kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan keteladanan pemimpin lokal. Kedua, memperluas jaringan kerja sama melalui pembagian peran antarjorong, pemuda, tokoh adat, dan lembaga nagari. Ketiga, menghidupkan norma gotong royong dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketiga langkah tersebut dapat membantu mengembalikan partisipasi warga tanpa mengabaikan realitas perubahan sosial yang sedang berlangsung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modal sosial budaya masyarakat Nagari Padang Laweh masih tergolong cukup kuat. Hal ini terlihat dari masih terpeliharanya hubungan kekerabatan, budaya musyawarah, solidaritas sosial, penghormatan kepada tokoh adat, serta keterlibatan warga dalam kegiatan adat dan keagamaan. Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam partisipasi gotong royong pembangunan fasilitas umum. Kehadiran warga dalam beberapa kegiatan hanya berkisar dua puluh persen

dari penduduk sekitar lokasi, sehingga partisipasi pembangunan dapat dikatakan menurun dibandingkan kondisi sebelumnya.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, mobilitas warga, perubahan gaya hidup, penggunaan teknologi komunikasi yang mengurangi interaksi langsung, serta melemahnya rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan nagari. Hubungan modal sosial budaya dengan partisipasi masyarakat bersifat erat, tetapi tidak otomatis. Modal sosial perlu dikelola melalui komunikasi yang terbuka, jadwal kegiatan yang realistis, peran tokoh adat dan pemuda, pembagian tugas yang jelas, serta penghargaan sosial bagi warga yang aktif. Pemerintah nagari disarankan memperkuat musyawarah partisipatif, menghidupkan kembali gotong royong berbasis jorong, dan menjadikan pembangunan sebagai ruang memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, A., Prayitno, G., Ari, I. R. D., Rahmawati, Wardani, L. E., & Meidiana, C. (2022). The role of social capital facing pandemic COVID-19 in tourism village to support sustainable agriculture: Empirical evidence from two tourism villages in Indonesia. *Economies*, 10(12), 320. <https://doi.org/10.3390/economies10120320>
- Badaruddin, Kariono, Ermansyah, & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Bahri, S., Maidin, R., Asmirah, Iskandar, Nonci, N., Burchanuddin, A., & Harifuddin. (2023). The urgency of social capital in local community development. *Formosa Journal of Social Sciences*, 2(3), 459–468. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6462>
- BPS Kabupaten Sijunjung. (2025). Kecamatan Koto VII dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in reflexive thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Delisa, A., Prayitno, G., & Wicaksono, A. D. (2024). Keterkaitan modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kuniran. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 16(2), 155–164. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.02.4>
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: The role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Latifah, N., Ningsih, Y., Indry, & Assyahri, W. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari di Sumatera Barat. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 47–54.
- Mathews, M. C. (2021). How village leaders in rural Amazonia create bonding, bridging, and linking social capital configurations to achieve development goals, and why they are so difficult to maintain over time. *World Development*, 146, 105541. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105541>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nosratabadi, S., Khazami, N., Abdallah, M. B., Lackner, Z., Band, S. S., Mosavi, A., & Mako, C. (2020). Social capital contributions to food security: A comprehensive literature review. *Foods*, 9(11), 1650. <https://doi.org/10.3390/foods9111650>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sarjiyanto, S., Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). The impact of typology capital on community empowerment programs: Evidence from rural development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 17–35. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20083>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Uphoff, N. (2000). Understanding social capital: Learning from the analysis and experience of participation. In P. Dasgupta & I. Serageldin (Eds.), *Social capital: A multifaceted perspective* (pp. 215–249). World Bank.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.